



DAMPAK REALOKASI SUBSIDI PUPUK MENJADI SUBSIDI HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH (HPP) GABAH TERHADAP PENDAPATAN PETANI

Akhmad Riyadi Wastra¹ dan Ahmad Dalhar²

¹Pensiunan PNS Kementerian Pertanian RI

²Technological Development Enza Zaden

Email : riyadi.wastra@uinjkt.ac.id



[10.15408/saj.v1i2.22724](https://doi.org/10.15408/saj.v1i2.22724)

ABSTRACT

Nowadays, the fertilizer subsidy program is less effective indicated by the scarcity of supply and the soaring price of fertilizer at the farmer level. In this condition, the government, DPR, and the public are relatively dissatisfied with the current subsidy policy, so that it becomes a discourse to change the fertilizer subsidy mode that is direct to producers into subsidies that are directly applied to farmers. It must be realized that subsidies applied to producers as well as direct subsidies to farmers will have advantages and disadvantages based on the factors that influence them. Therefore, in order to respond to the discourse, it is necessary to conduct research to calculate the impact of the reallocation of the fertilizer subsidy on farmers' income. The purpose of this study is to compare the impact of fertilizer subsidies and HPP rice subsidies on farmers' income. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews or FGD

with rice farmers. Secondary data can be from various related literature. The data sources for this research are farmers or farmer groups, the Central Bureau of Statistics, the Department of Agriculture, and the Ministry of Agriculture. Data analysis using PAM (Policy Analysis Matrix) method. The result of this research is that the government purchase price subsidy has a more significant impact on farmers' income than the fertilizer subsidy.

Keywords: Fertilizer subsidies, HPP grain, policy analysis matrix, income

ABSTRAK

Implementasi program pupuk bersubsidi saat ini kurang efektif ditandai terjadinya kelangkaan pasokan dan melonjaknya harga pupuk ditingkat petani. Kondisi ini membuat pemerintah, DPR dan masyarakat relatif belum puas terhadap kebijakan subsidi pupuk saat ini sehingga menjadi wacana untuk mengganti modus subsidi pupuk yang dibayarkan langsung ke produsen menjadi subsidi langsung yang dibayarkan ke petani. Bagaimanapun harus disadari bahwa subsidi yang dibayarkan langsung kepada produsen maupun subsidi yang dibayarkan langsung ke petani akan memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam rangka merespon wacana tersebut perlu dilakukan penelitian untuk menghitung dampak realokasi subsidi pupuk tersebut pada pendapatan petani. Tujuan penelitian ini, mengetahui perbandingan dampak subsidi pupuk dan subsidi HPP gabah terhadap pendapatan petani. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara atau FGD dengan petani padi. Data sekunder di dapat dari berbagai literature yang terkait. Sumber data penelitian ini adalah petani atau kelompok tani, Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian. Analisis data menggunakan metode PAM (Policy Analysis Matrix). Hasil penelitian ini adalah subsidi harga pembelian pemerintah lebih berdampak signifikan terhadap pendapatan petani daripada subsidi pupuk.

Kata Kunci: Subsidi pupuk, HPP gabah, Policy Analysis Matrix, pendapatan

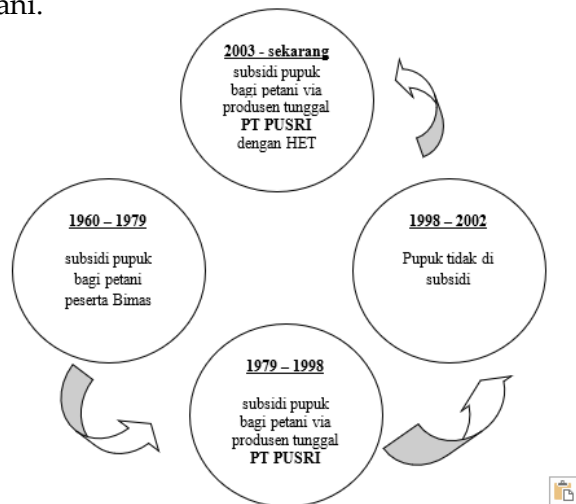
A. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sektor pertanian masih tumbuh positif, padahal sektor lainnya umumnya negatif pada saat pandemi covid-19 yang hampir dua tahun ini. Kinerja sektor pertanian tidak lepas dari kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sector pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani. Pupuk telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi tanamnya. Menurut Permendag nomor 15/MDAG/PER/4/2013 pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan

Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan berbagai resolusi atau deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Dinamika dan perkembangan kebijakan pupuk dapat dibagi menjadi empat periode. Periode 1960 – 1979, subsidi pupuk bagi petani peserta Bimas dan tersedianya peluang bisnis pupuk bagi setiap badan usaha. Periode 1979 – 1998, seluruh pupuk untuk sektor pertanian disubsidi dengan produsen dan distributor tunggal yaitu PT PUSRI. Periode 1998 – 2002, pupuk tidak disubsidi dan pupuk menjadi komoditas bebas berlaku mekanisme pasar. Periode 2003 sampai sekarang subsidi pupuk melalui produsen PT PUSRI dengan instrumen harga eceran tertinggi (HET) dan pendistribusian berdasarkan

rayonisasi, yaitu setiap produsen bertanggungjawab memenuhi permintaan di wilayah masing-masing.

Menurut Syafa'at *et.al* (2006), implementasi program pupuk bersubsidi saat ini kurang efektif ditandai terjadinya kelangkaan pasokan dan melonjaknya harga pupuk ditingkat petani. Kondisi ini membuat pemerintah, DPR dan masyarakat relatif belum puas terhadap kebijakan subsidi pupuk saat ini sehingga menjadi wacana untuk mengganti modus subsidi pupuk yang dibayarkan langsung ke produsen menjadi subsidi langsung yang dibayarkan ke petani. Bagaimanapun harus disadari bahwa subsidi yang dibayarkan langsung kepada produsen maupun subsidi yang dibayarkan langsung ke petani akan memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, dalam rangka merespon wacana tersebut perlu dilakukan penelitian untuk menghitung dampak realokasi subsidi pupuk tersebut pada pendapatan petani. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak subsidi pupuk terhadap pendapatan petani, mengetahui dampak subsidi HPP gabah terhadap pendapatan petani dan memberikan rekomendasi terbaik dalam kebijakan subsidi untuk meningkatkan pendapatan petani.



Gambar 1. Periode Subsidi Pupuk

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan metode survey dan analisis data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara atau FGD dengan petani padi. Data sekunder di dapat dari berbagai *literature* yang terkait. Sumber data penelitian ini adalah petani atau kelompok tani, Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian. Populasi penelitian ini petani di Jawa sebagai daerah lumbung padi nasional dengan fokus pada kabupaten sentra padi dengan menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel 100 petani dengan *margin of error* 10%.

Variabel penelitian ini terdiri dari struktur input dan output fisik (*tradable input*, faktor domestik, dan output), harga privat (*tradable input*, harga faktor domestik, dan harga output di tingkat petani), perkembangan luas area, produksi produktivitas, nilai pemilahan kandungan komponen input, faktor konversi harga pasar aktual (privat) ke harga bayangan (sosial), Perkembangan harga dasar dan harga impor pupuk kimia.

Analisis penelitian menggunakan metode PAM (*Policy Analysis Matrix*). Dengan menggunakan metode PAM tingkat keuntungan pada nilai finansial dan ekonomi usahatani padi, kebijakan pemerintah dapat dihitung sekaligus secara menyeluruh dan sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Pendapatan Petani

1. Penggunaan Input

a. Benih

Pada pelaksanaan usahatani padi, benih yang digunakan oleh petani umumnya menggunakan benih padi bersertifikat karena

memiliki kualitas yang baik dan keunggulannya tahan terhadap serangan hama penyakit yang telah dibuktikan melalui serangkaian uji di lapangan. Selain itu umur panen relatif pendek dan benihnya mudah diperoleh dengan harga relatif terjangkau. Benih yang digunakan untuk usahatani padi sebanyak 15 - 30 kilogram per hektar, relatif sama dengan benih yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu sebanyak 25 kilogram per hektar. Hal ini terjadi karena petani dalam penanamannya sudah menggunakan jarak tanam seperti disarankan oleh penyuluh pertanian di masing-masing daerah.

b. Pupuk

Petani membudidayakan tanaman padi dengan menggunakan pupuk kimia (Urea, TSP, NPK). Pupuk yang digunakan oleh petani rata-rata untuk per hektarnya adalah 590 kilogram untuk total penggunaan pupuk Urea, TSP dan KCL. Apabila dibandingkan dengan dosis yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 200 kilogram, 100 kilogram TSP, dan 100 kilogram NPK (total = 400 kilogram per hektar) maka jumlah pupuk yang digunakan oleh petani masih lebih besar dari dosis yang dianjurkan pemerintah.

Kegiatan pemupukan yang dilakukan petani padi di Banten lebih sedikit dibandingkan petani di daerah lain di pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena setiap petani memiliki takaran masing-masing yang biasa dilakukan dalam kegiatan usahatannya. Hal ini menyebabkan biaya pengeluaran untuk membeli pupuk oleh petani lebih besar yaitu Rp 1.200.000 per hektar. Rata-rata harga pupuk 2.000 per kilogramnya sedangkan dalam mendapatkan pupuk ini petani umumnya diperoleh dari toko-toko pertanian yang terdapat di sekitar daerah penanaman atau pemukiman.

c. Pestisida

Usahatani padi juga tidak terlepas dari pengganggu seperti hama dan penyakit. Pengendali hama dan penyakit padi oleh petani biasanya dengan menggunakan pestisida. Pestisida yang digunakan adalah pestisida dalam bentuk semprot, untuk mengantisipasi

serangan hama dan penyakit tersebut petani menyemprotkan pestisida yang biasa digunakan dalam kegiatan usahatani. Jenis pestisida yang digunakan oleh petani padi menggunakan merek dagang yang berbeda, hal tersebut disebabkan banyaknya jenis merek dagang yang beredar di pasar, sehingga dalam penggunaan obat tergantung kepercayaan petani terhadap merek dagang tertentu.

Organisme pengganggu tanaman padi mulai ada baik pada fase vegetatif maupun generative antara lain gulma, keong mas, *sundep beluk* (penggerek batang padi), wereng yaitu yang umum wereng batang coklat. Kondisi ini berdampak pada jenis pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan oleh petani yaitu berupa herbisida, moluskisida, insektisida dan fungisida. Sama halnya dengan penggunaan pupuk, aplikasi pestisida oleh petani sebagian besar diatas dosis yang dianjurkan oleh formulator atau perusahaan produsen pestisida seperti aplikasi SPONTAN 400 SL untuk mengendalikan penggerek batang padi formulator menganjurkan dosis aplikasi 1 – 1,5 liter per hektar tapi aplikasi rata-rata diatas dosis anjuran sebanyak dua kali lipat.

Implikasi dari penggunaan dosis adalah membengkaknya biaya pengendalian organisme tanaman yang seharusnya dengan biaya Rp. 300.000 per hektar cukup maka membengkak menjadi Rp 450.000 per hektar. Dampak dari penggunaan pestisida berlebihan, hama akan lebih resisten sehingga bisa lebih kebal terhadap pestisida, munculnya hama baru dan bisa mengganggu ekosistem tanaman padi. selain itu, dampak negatifnya akan mengurangi keuntungan petani padi karena terjadi *over budget*.

d. Penggunaan Tenaga Kerja

1. Pengolahan Lahan

Proses pengolahan lahan yang dilakukan pada usahatani padi adalah dengan menggunakan alat bajak berupa traktor. Traktor tersebut disewa beserta tenaga kerja yang mengoperasikannya.

Harga sewa rata-rata Rp 600.000 sampai selesai. Lahan yang akan digunakan untuk penanaman padi dibajak menggunakan traktor. Setelah dibajak kemudian lahan tersebut dilakukan perlakuan lain yaitu kegiatan *mopok* dan *nampingan* menggunakan tenaga kerja dari anggota dan luar anggota keluarga, dengan upah rata-rata Rp 30.625 per hari per tenaga kerja. Sehingga total untuk tenaga kerja pengolahan lahan rata-rata Rp. 840.000 dalam satu musim tanam.

2. Penanaman

Tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan penanaman sebagian besar adalah wanita. Alasan menggunakan tenaga kerja wanita pada kegiatan ini adalah karena pekerjaan wanita lebih rapi dan hati-hati dibanding pria. Upah yang dibayarkan sudah menjadi kebiasaan dengan sistem borongan dengan upah per hektarnya mulai dari Rp 420.000 – Rp 500.000, tenaga kerja ini berasal dari luar anggota keluarga.

3. Penyiangan

Kegiatan penyiangan ini biasanya dilaksanakan dalam satu musim sebanyak dua kali. Penyiangan pertama dilaksanakan ketika tanaman berusia 15 - 20 hari setelah tanam. Kegiatan yang dilakukan adalah pencabutan gulma dan tanaman lain yang mengganggu pertumbuhan padi. Jumlah tenaga kerja yang digunakan rata-rata adalah 5 HOK per hektar.

4. Pemupukan

Kegiatan pemupukan menggunakan tenaga kerja yang bersumber dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga dengan upah rata-rata sama yaitu Rp 35.000 per hari per tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pemupukan ini adalah sebesar 6 HOK per hektar.

5. Pengendalian Hama dan Penyakit

Kegiatan pengendalian hama dan penyakit ini rutin dilaksanakan setiap minggu. Tenaga kerja yang digunakan

berasal dari anggota keluarga maupun dari luar anggota keluarga. Jumlah tenaga kerja luar anggota keluarga yang digunakan sebanyak 6 HOK per hektar dan tenaga kerja dalam anggota keluarga yang digunakan adalah 8 HOK per hektar. Hal ini disebabkan seringnya dilakukan penyemprotan dalam kegiatan pengendalian hama dan penyakit.

6. Panen

Kegiatan panen biasanya menggunakan tenaga kerja luar anggota keluarga. Sistem upahnya menggunakan sistem *bawon* (sistem borongan) dan sistem pengupahan langsung. Sistem pengupahan dengan cara *bawon* adalah sistem pengupahan dengan menggunakan gabah sebagai alat pembayaran, yang perbandingannya bisa berbeda setiap daerah (tergantung kesepakatan dan faktor kebiasaan), mulai dari 1:6, 1:7 dan 1:8 artinya bahwa setiap enam kilogram gabah yang dihasilkan maka pemanen akan mendapatkan satu kilogram gabah. Sistem pengupahan langsung yaitu langsung dibayar tunai dengan upah yang diberikan Rp 25.000 per 100 kilogram dari hasil panen yang diperoleh, tetapi sistem pembayaran ini jarang digunakan yang biasa digunakan adalah sistem *bawon*.

2. Pendapatan Usahatani Padi

Penelitian ini melakukan analisis terhadap usahatani yang dilaksanakan pada satu luasan lahan yaitu satu hektar. Analisis yang dilakukan mengacu kepada konsep pendapatan atas biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya tunai dan biaya total. Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk tunai, seperti biaya sarana produksi padi, tenaga kerja luar anggota keluarga dan pajak. Biaya total adalah biaya tunai yang dikeluarkan ditambah dengan biaya yang diperhitungkan. Biaya diperhitungkan adalah biaya yang pengeluarannya tidak dalam bentuk tunai, contohnya adalah

penggunaan benih dari pertanaman sebelumnya, penyusutan alat, dan penggunaan tenaga kerja dari dalam keluarga.

a. Analisis Penerimaan Usahatani Padi

Hasil panen yang dijual oleh petani adalah dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) yaitu rata-rata sebanyak 6 ton per hektar dengan rata-rata harga jual GKP yang diterima oleh petani Rp 4.500 per kilogram. Apabila hasil panen tersebut dikalikan dengan harga jualnya maka akan diperoleh penerimaan usahatani. Berdasarkan hasil perkalian antara harga jual dengan jumlah hasil panennya, maka diketahui penerimaan total usahatani yang diperoleh petani selama satu musim tanam. Penerimaan total usahatani petani padi rata-rata adalah Rp 27.000.000 per hektar (harga privat) dan Rp. 20.640.000 per hektar (harga sosial).

b. Analisis Biaya Usahatani Padi

Biaya usaha tani padi dikelompokkan dalam 2 golongan yaitu input tradable dan faktor domestik. Berdasarkan harga privat, besarnya biaya input *tradable* usaha tani padi sebesar Rp 2.008.000 per hektar dan faktor domestik sebesar Rp. 14.060.000 per hektar. Berdasarkan harga sosial, biaya input *tradable* usaha tani padi sebesar Rp. 2.510.000 per hektar dan faktor domestik sebesar Rp. 14.080.000 per hektar. Besarnya biaya tunai yang dikeluarkan oleh petani disebabkan karena petani banyak menggunakan sumberdaya yang berasal dari luar anggota keluarga. Sumberdaya tersebut meliputi tenaga kerja, pupuk, benih, pestisida dan pajak. Tenaga kerja luar keluarga juga digunakan oleh petani dalam melakukan kegiatan seperti pengolahan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan, dan panen.

Besarnya tenaga kerja luar anggota keluarga yang digunakan disebabkan oleh, sumber tenaga kerja dari dalam anggota keluarga tidak mencukupi. Selain itu, ada diantara anggota keluarga yang lebih memilih bekerja diluar usahatani. Akibatnya petani harus

mengeluarkan biaya tunai yang besar untuk membiayai tenaga kerja dari luar anggota keluarga ini. Selain tenaga kerja, yang menyebabkan besarnya biaya tunai adalah biaya untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan pajak.

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli benih oleh petani adalah Rp 350.000 per hektar. Besarnya biaya tunai yang dikeluarkan untuk membeli benih disebabkan diantara petani hanya sedikit yang menggunakan benih dari pertanaman sebelumnya. Penyebab yang ditimbulkan jika petani menggunakan benih dari pertanaman sebelumnya, biasanya produksi padi mengalami penurunan. Petani lebih memilih membeli benih dari toko pertanian terdekat yang sudah teruji bagus atau membeli dari petani yang menjual khusus benih padi yang bagus.

Pupuk yang digunakan oleh petani adalah Urea, TSP, dan NPK. Berdasarkan hasil penelitian jarang sekali ditemui petani yang tidak menggunakan pupuk kimia. Hal ini menyebabkan biaya tunai yang harus dikeluarkan oleh petani cukup tinggi yaitu sebesar Rp 1.208.000 per hektar. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa ternyata pupuk urea yang digunakan oleh petani lebih besar bila dibandingkan dengan pupuk yang lainnya. Hal ini terjadi karena pupuk Urea lebih diperlukan untuk pertumbuhan tanaman padi sejak dipindahkannya dari lahan semai sampai akan menghasilkan buah. Hal ini menyebabkan biaya penggunaannya menjadi lebih besar. Penggunaan pupuk yang dilakukan oleh petani, jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian tentang penggunaan pupuk dalam usahatani padi, ternyata jumlah pupuk yang digunakan melebihi standar yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena petani menganggap bahwa semakin banyak pupuk yang digunakan maka jumlah produk yang akan dihasilkan menjadi lebih tinggi.

Biaya untuk pestisida juga merupakan salah satu penyebab besarnya biaya tunai yang dikeluarkan oleh petani. Pada penelitian ini biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk biaya pestisida adalah Rp

450.000 per hektar untuk petani. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk pestisida ini dikarenakan petani terlalu protektif terhadap tanamannya, sehingga terkadang dalam kondisi tidak terserang hama sekalipun petani tetap melakukan penyemprotan sebagai antisipasi terhadap serangan hama.

c. Pendapatan Usahatani Padi

Usahatani akan dikatakan menguntungkan jika selisih antara penerimaan dan pengeluarannya bernilai positif. Selisih tersebut akan dinamakan pendapatan atas biaya tunai jika penerimaan totalnya dikurangkan dengan pengeluaran tunai. Apabila penerimaan totalnya dikurangkan dengan pengeluaran totalnya maka selisih tersebut dinamakan pendapatan atas biaya total. Pendapatan petani padi rata-rata sebesar Rp. 10.932.000 per hektar per musim tanam atau rata-rata pendapatan per hektar per bulan sebesar Rp. 2.733.000.

Berdasarkan harga sosial, pendapatan petani padi sebesar Rp. 4.050.000 per hektar per musim atau rata-rata pendapatan sebesar Rp. 1.012.000 per hektar per bulan lebih rendah di banding dengan berdasarkan pendapatan harga privat atau hampir separuh dari harga privat. Hal ini disebabkan karena kecilnya penerimaan akibat harga gabah kering panen lebih rendah, sedangkan biaya baik input *tradable* maupun faktor domestik lebih tinggi. Berdasarkan pendapatan sosial maka pendapatan petani sangat kecil sehingga mengakibatkan posisi petani termarjinalkan dan tergolong rumah tangga miskin.

Tabel 7. Perhitungan *Policy Analysys Matrix* berdasarkan data *exesting*

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input tradable	Faktor domestik	
Privat	27,000,000	2,008,000	14,060,000	10,932,000
Sosial	20,640,000	2,510,000	14,080,000	4,050,000
I	6,360,000	(502,000)	(20,000)	6,882,000
NPCO	1.31	0.800	0.999	2.699

Dampak Subsidi Harga Pokok Pembelian Terhadap Pendapatan Petani

1. Penggunaan Input

Kegiatan usaha tani padi diasumsikan kondisi input umumnya tetap, kecuali subsidi pupuk di cabut dan dialihkan ke subsidi harga pembelian petani. Rincian kondisi input dijelaskan sebagai berikut :

a. Benih

Umumnya petani padi menggunakan benih bersertifikat dengan menggunakan benih padi sebanyak 15 - 30 kilogram per hektar, relatif sama dengan benih yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu sebanyak 25 kilogram per hektar.

b. Pupuk

Petani membudidayakan tanaman padi dengan menggunakan pupuk kimia (Urea, TSP, NPK) yang sepenuhnya tidak lagi di subsidi oleh pemerintah dan subsidi pupuk sebanyak Rp. 31 triliun rupiah pada tahun ini dialihkan menjadi harga pembelian gabah yang tahun ini mencapai 79 juta ton atau subsidi harga pembelian gabah sebanyak Rp. 392 / kg sehingga diskenariokan harga pupuk menjadi tiga alternatif yaitu Rp. 4.200 / kg (sama seperti harga pupuk non subsidi saat ini), Rp 4.800 / kg dan Rp. 5.000/kg. Adapun pupuk yang digunakan oleh petani rata-rata untuk per hektarnya adalah sama yaitu 590 kilogram untuk total penggunaan pupuk Urea, TSP dan KCL. atau jumlah pupuk yang digunakan oleh petani masih lebih besar dari dosis yang dianjurkan pemerintah dengan kegiatan pemupukan yang dilakukan petani padi di Banten masih tetap lebih sedikit dibandingkan petani di daerah lain di pulau Jawa.

c. Pestisida

Sementara pengendali hama dan penyakit padi oleh petani masih menggunakan pestisida sesuai dengan harga pasar dengan rata-rata biaya pengendalian organisme tanaman biasanya mengalami kenaikan menyesuaikan dengan inflasi. Penggunaan pestisida masih akan terus tumbuh seiring dengan semakin resistennya organisme pengganggu tanaman akibat penggunaannya yang berlebihan atau diatas dosis anjuran.

d. Penggunaan Tenaga Kerja

Sama halnya dengan penggunaan benih dan pestisida, alokasi tenaga kerja juga diskenariokan sama atau tetap sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu :

1. Pengolahan Lahan

Proses pengolahan lahan yang dilakukan pada usahatani padi masih mengandalakan alat bajak berupa traktor yang umumnya sewa dengan tenaga kerja yang mengoperasikannya. Harga sewa rata-rata Rp 600.000 sampai selesai. Selain itu, masih ada alokasi biaya tenaga kerja untuk kegiatan *mopok* dan *nampingan* menggunakan tenaga kerja dari anggota dan luar anggota keluarga, dengan upah rata-rata Rp 30.625 per hari per tenaga kerja. Sehingga total untuk tenaga kerja pengolahan lahan rata-rata Rp. 840.000 dalam satu musim tanam.

2. Penanaman

Upah yang dibayarkan sudah menjadi kebiasaan dengan sistem borongan dengan upah per hektarnya mulai dari Rp 420.000 – Rp 500.000, tenaga kerja ini berasal dari luar anggota keluarga.

3. Penyiangan

Kegiatan penyiangan ini biasanya dilaksanakan dalam satu musim sebanyak dua kali dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan rata-rata adalah 5 HOK per hektar.

4. Pemupukan

Kegiatan pemupukan menggunakan tenaga kerja yang bersumber dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga dengan upah rata-rata sama yaitu Rp 35.000 per hari per tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pemupukan ini adalah sebesar 6 HOK per hektar.

5. Pengendalian Hama dan Penyakit

Kegiatan pengendalian hama dan penyakit ini rutin dilaksanakan setiap minggu. Jumlah tenaga kerja luar anggota keluarga yang digunakan sebanyak 6 HOK per hektar dan tenaga kerja dalam anggota keluarga yang digunakan adalah 8 HOK per hektar. Hal ini disebabkan seringnya dilakukan penyemprotan dalam kegiatan pengendalian hama dan penyakit.

6. Panen

Kegiatan panen biasanya menggunakan tenaga kerja luar anggota keluarga. Sistem upahnya menggunakan sistem *bawon* (sistem borongan) dan sistem pengupahan langsung. Sistem pengupahan dengan cara *bawon* adalah sistem pengupahan dengan menggunakan gabah sebagai alat pembayaran, yang perbandingannya bisa berbeda setiap daerah (tergantung kesepakatan dan faktor kebiasaan), mulai dari 1:6, 1:7 dan 1:8 artinya bahwa setiap enam kilogram gabah yang dihasilkan maka pemanen akan mendapatkan satu kilogram gabah. Sistem pengupahan langsung yaitu langsung dibayar tunai dengan upah yang diberikan Rp 25.000 per 100 kilogram dari hasil panen yang diperoleh, tetapi sistem pembayaran ini jarang digunakan yang biasa digunakan adalah sistem *bawon*.

2. Pendapatan Usaha Tani Padi

Pada bagian ini juga melakukan analisis terhadap usaha tani yang dilaksanakan pada satu luasan lahan yaitu satu hektar. Analisis

yang dilakukan mengacu kepada konsep pendapatan atas biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya tunai dan biaya total. Biaya diperhitungkan adalah biaya yang pengeluarannya tidak dalam bentuk tunai.

Tabel 8. Perhitungan *Policy Analysys Matrix* berdasarkan data skenario 1

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input tradable	Faktor domestik	
Privat	29,352,000	3,336,800	14,060,000	11,955,200
Sosial	20,640,000	1,812,500	14,080,000	4,747,500
I	8,712,000	1,524,300	(20,000)	7,207,700
NPCO	1.42	1.84	0.999	2.52

a. Analisis Penerimaan Usahatani Padi

Hasil panen yang dijual oleh petani juga sama rata-rata sebanyak 6 ton per hektar dengan rata-rata harga yang diterima oleh petani Rp 4.892 per kilogram yang didalamnya terdapat subsidi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp. 392 per kilogramnya, sehingga penerimaan total usaha tani yang diperoleh petani selama satu musim tanam. Penerimaan total usahatani petani padi rata-rata adalah Rp 29.352.000 per hektar (harga privat). Adapaun penerimaan berdasarkan harga sosial tetap yaitu sebesar Rp. 20.640.000 per hektar.

b. Analisis Biaya Usaha Tani Padi

Berdasarkan skenario I tentang perubahan pemberian subsidi input (pupuk) menjadi subsidi output (harga pembelian pemerintah), maka besarnya biaya berdasarkan harga privat adalah input *tradable* usaha tani padi sebesar Rp 3.336.800 per hektar dan faktor domestik tetap sebesar Rp. 14.060.000 per hektar. Berdasarkan harga sosial, biaya input *tradable* usaha tani padi sebesar Rp. 1.812.500 per hektar dan faktor domestik tetap sebesar Rp. 14.080.000 per hektar.

c. Pendapatan Usaha Tani Padi

Skenario I menggambarkan pergeseran subsidi input menjadi subsidi output ternyata memberikan dampak lebih baik. Berdasarkan perhitungan harga privat, pendapatan petani padi rata-rata sebesar Rp.

11.955.200 per hektar per musim tanam atau rata-rata pendapatan per hektar per bulan sebesar Rp. 2.988.800. Sedangkan, berdasarkan harga sosial, pendapatan petani padi sebesar Rp. 4.747.500 per hektar per musim atau rata-rata pendapatan sebesar Rp. 1.186.875 per hektar per bulan lebih rendah di banding dengan berdasarkan pendapatan harga privat atau hampir separuh dari harga privat.

Skenario kebijakan Subsidi Pupuk dan Subsidi Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

1. Struktur Input Output Fisik

Struktur input-output fisik di tingkat petani terbagi menjadi empat bagian. Pertama, *input tradable* (barang-barang input yang diperdagangkan) meliputi benih, pupuk kimia seperti pupuk urea, SP 36, ZA, NPK Phonska, pupuk organik, pestisida, dan herbisida. Kedua, peralatan yang digunakan. Ketiga, penggunaan tenaga kerja, modal kerja, pajak lahan, dan sewa tanah. Keempat, produksi (output) yang dihasilkan.

a. Harga Privat dan Harga Sosial

Dalam konteks ini, harga privat didasarkan pada harga aktual yang didapat dari usahatani petani sampel selaku lokasi penelitian. Harga benih padi lebih mahal dari gabah itu sendiri karena untuk dijadikan benih, usahatani padi sawah harus dipersiapkan dengan perlakuan yang berbeda dengan usahatani padi sawah untuk konsumsi. Harga sosial atau harga bayangan adalah harga dunia atau harga internasional yang sesuai (harga GIF untuk komoditas yang diimpor dan harga FOB untuk komoditas yang diekspor) untuk mengestimasi harga efisiensi, baik untuk output maupun input yang tradabel.

b. Budget Privat dan Budget Sosial

Pada budget privat, total biaya yang dikeluarkan untuk usahatani padi pada musim hujan lebih besar dibandingkan musim kemarau, namun dengan produktivitas dan harga gabah yang lebih tinggi menyebabkan keuntungan bersih yang diperoleh pada musim hujan lebih besar daripada musim kemarau. Total biaya (tidak termasuk lahan) adalah penjumlahan biaya input tradabel dan faktor domestik. Keuntungan bersih (termasuk lahan) adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya (tidak termasuk lahan) dan *Social opportunity cost of land* usahatani padi. *Social opportunity cost of land* usahatani padi merupakan keuntungan sosial (tidak termasuk lahan) komoditas jagung sebagai komoditas alternatif terbaik dari padi.

c. Tingkat Keuntungan

Pada bagian ini dibahas dua aspek keuntungan, yaitu keuntungan privat (finansial) dan keuntungan sosial (ekonomi). Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dan biaya-biaya. Dalam analisis keuntungan finansial, maka penerimaan dan biaya (input) didasarkan pada tingkat harga pasar atau harga aktual yang diperoleh dari usahatani maupun pengolahan hasil. Keuntungan finansial diharapkan mempunyai nilai positif dan meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan keuntungan ekonomi dihitung jika terjadi pada pasar persaingan sempurna, dimana tidak ada kegagalan pasar dan campur tangan atau kebijakan pemerintah.

Pada analisis keuntungan ekonomi, penerimaan dan biaya (input) didasarkan pada tingkat harga sosial atau harga bayangan (*shadow price*), maka pajak dan subsidi dianggap sebagai suatu pembayaran aliran sehingga tidak mempengaruhi arus biaya dan penerimaan. Suatu usahatani yang menguntungkan secara finansial belum tentu menguntungkan secara ekonomi. Hal tersebut dimungkinkan, misalnya karena terdapat subsidi pada input produksi sehingga keuntungan finansial akan meningkat, namun keuntungan

ekonomi tetap atau mengalami penurunan. Apabila tidak disertai peningkatan produktivitas dan atau harga output, maka secara ekonomi kebijakan subsidi tersebut tidak akan meningkatkan keuntungan ekonomi.

Tabel 9. Perhitungan *Policy Analysys Matrix* berdasarkan data skenario 2

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input tradable	Faktor domestik	
Privat	29,352,000	3,699,200	14,060,000	11,592,800
Sosial	20,640,000	1,812,500	14,080,000	4,747,500
I	8,712,000	1,886,700	(20,000)	6,845,300
NPCO	1.42	2.04	0.999	2.44

d. Analisis Keuntungan Finansial

Mengetahui efisiensi suatu usahatani maka cara yang paling sederhana adalah mengetahui nilai keuntungan. Suatu usaha akan terus dijalankan apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dari nol atau telah mencapai keuntungan normal. Indikator efisiensi yang lebih tepat adalah nilai efisiensi ekonomi (sosial) daripada efisiensi finansial (privat). Efisiensi finansial atau keuntungan finansial merupakan ukuran daya saing dalam harga pasar aktual.

Tabel 10. Perhitungan *Policy Analysys Matrix* berdasarkan data skenario 3

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input tradable	Faktor domestik	
Privat	29,442,000	3,820,000	14,060,000	11,562,000
Sosial	20,640,000	1,812,500	14,080,000	4,747,500
I	8,802,000	2,007,500	(20,000)	6,814,500
NPCO	1.43	2.11	0.999	2.44

Pada Tabel diatas, berdasarkan skenario 2 dan 3 menunjukkan bahwa keuntungan finansial usahatani padi pada masing-masing sebesar Rp 11.592.800 per hektar dan Rp 11.562.000 per hektar atau terjadi perbedaan keuntungan relatif tipis yakni sebesar Rp. 30.800 atau 0,3 persen. Adapun sistem usahatani padi masing-masing memberikan nilai R/G atau PBCR sama sebesar 1,65. Dapat dikatakan bahwa usahatani padi sawah di atas secara finansial layak, karena rasio R/C atau PBCR lebih besar dari satu. Menurut Monke dan Pearson (1995)

suatu aktivitas ekonomi yang mempunyai keuntungan finansial diatas normal merupakan indikator bahwa pengembangan aktivitas ekonomi tersebut masih dimungkinkan.

e. Analisis Keuntungan Ekonomi

Pendapat Gray *et al.* (1985), menyebutkan bahwa analisis keuntungan ekonomi merupakan analisis yang menilai suatu aktivitas ekonomi atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang memberi dan siapa yang menerima manfaat dari aktivitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka pada analisis keuntungan ekonomi tidak dibedakan antara keuntungan ditingkat petani dan keuntungan ditingkat pedagang. Dengan demikian analisis keuntungan ekonomi baik output maupun input yang digunakan berdasarkan harga sosial atau harga bayangan (*shadowprice*). Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi (sosial) usahatani padi pada scenario I dan II masing-masing sama sebesar Rp 4.747.500/ha. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem usahatani padilayak secara ekonomi, karena memberikan rasio R/C atau SBCR lebih besar dari 1 yaitu sebesar 1,3.

f. Divergensi

Pada dasarnya, PAM dimaksudkan sebagai alat analisis kebijakan dan dampak kebijakan tersebut, yang tersembunyi dalam divergensi. Setiap divergensi, baik yang disebabkan oleh distorsi kebijakan atau kegagalan pasar, seyogyanya dapat dijelaskan secara meyakinkan, kalau tidak ingin memunculkan anggapan bahwa telah terjadi kesalahan data. Divergensi input yang diperdagangkan (*tractable*) pada usahatani padi masing-masing pada kondisi *exesting* sebesar - Rp. 502.000, skenario I sebesar Rp. 1.524.300, skenario II sebesar Rp 1.886.700 dan pada skenario III sebesar Rp. 2.007.500 juga disebabkan oleh perbedaan harga privat yang dikeluarkan petani dengan harga sosialnya. Hasil analisis tersebut nilai divergensi input tradable umumnya positif setelah pengalihan subsidi pupuk ke subsidi

harga pokok pembelian artinya terdapat kebijakan yang menghasilkan harga privat yang lebih tinggi atau petani sebagai konsumen membayar harga input secara keseluruhan lebih mahal daripada harga sosialnya (pasar internasional).

Nilai positif pada divergensi input tradabel menunjukkan bahwa secara umum terjadi kebijakan subsidi negatif atau pajak. Namun hasil analisis mendalam terhadap input tradabel disebutkan bahwa petani sebagai konsumen menerima subsidi input tradabel berupa subsidi pupuk. Nilai negatif pada divergensi input tradabel menunjukkan adanya kebijakan subsidi. Hal ini berarti bahwa usahatani padi sawah menerima subsidi input dari pemerintah yang diterima petani pada usahatani padi pada musim hujan adalah benih, pupuk Urea, dan SP-36.

Divergensi keuntungan bersih (*net profit*) usahatani padi pada saat ini (*existing*) sebesar Rp 6.882.000 per hektar per musim, sedangkan pada skenario I, II dan III masing-masing sebesar Rp 7.207.700 per hektar per musim, Rp. 6.845.300 per hektar per musim dan Rp. 6.814.500. Kedua sistem usahatani padi sawah ini menunjukkan nilai divergensi keuntungan bersih (*net profit*) yang positif, berarti bahwa terdapat kebijakan insentif pada usahatani padi membuat surplus pada produsen (petani) bertambah atau kebijakan insentif membuat usahatani padi sawah menjadi efisien.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Dampak subsidi pupuk terhadap tingkat pendapatan petani padi per musim tanam adalah Rp. 10.932.000
2. Dampak peralihan subsidi pupuk menjadi subsidi harga pembelian pemerintah terhadap tingkat pendapatan petani padi per musim tanam dengan 3 skenario masing-masing adalah sebesar Rp.

11.955.200 (skenario 1), Rp. 11.592.800 (skenario II) dan Rp. 11.562.000

3. Berdasarkan data tingkat pendapatan, maka lebih baik subsidi harga pembelian pemerintah daripada subsidi pupuk dengan skenario I merupakan skenario terbaik.

Saran dari penelitian ini, sebaiknya subsidi pupuk dirubah menjadi subsidi harga pembelian pupuk karena dampaknya lebih signifikan terhadap pendapatan petani. Penelitian selanjutnya agar dilakukan simulasi sistem dinamis subsidi input atau output padi.

DAFTAR PUSTAKA

Alimoeso, S. 2010. Ketersediaan Pupuk 2010 – 2014 dan Subsidi Pupuk. *Jurnal Pangan*. Vol 9 No 1 Hal 40 – 50.

Alma, B. 2002. *Pengantar Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

Amang, Beddu dan M. Husein Sawit. 1999. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional*. IPB Press. Bogor.

Angipora, M.P. 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Cet 2. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Arisandi, N, W, W., Sudarma, I.M., dan Rantau, I,K., 2016. Efektivitas Distribusi Subsidi Pupuk Organik dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah di Subak Sungsang Desa Tibubiu Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, Vol 5 No 1 Hal 1 – 10.

Darwis.V. dan C. Muslim. 2007. Revitalisasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk dalam Mendukung Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan XV(2)*.

- Darwis, V. dan Saptana. 2010. Rekonstruksi Kelembagaan dan Uji Teknologi Pemupukan: Kebijakan Strategis Mengatasi Kelangkaan Pupuk. *Analisis Kebijakan Pertanian* 8(2): 167-186.
- Gray, C., P, Simanjuntak, L.K. Sabur, dan P.F.L. Maspaitella. 1985. *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta : Gramedia.
- Hadi, P.U., D.K. Swastika, F.B.M. Dabukke, N.K. Agustin, M. Siregar, D. Hidayat, dan M. Maulana. 2007. Analisis Penawaran dan Permintaan Pupuk di Indonesia 2007 – 2012. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Hadi,P.U., B. Rachman, dan V. Darwis. 2011. Laporan Awal Kajian Strategis Kebijakan Subsidi Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Hendrawan, D.S., Daryanto, A., Sanim, B dan Siregar, H. 2011. Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk : Penentuan Pola Subsidi dan Sistem Distribusi Pupuk di Indonesia. *Jurnal Agribisnis dan Manajemen*. Vol 8 No 2 Hal 85 – 96.
- Hernanto, F. 1991. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Kameo, D. D. (2010). Subsidi Pupuk : Saatnya Memberikan Kepercayaan Pada Petani. *Jurnal Suar*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2010, 21 – 24.
- Kasiyati, S (2010). Analisis Dampak Subsidi Harga Pupuk Terhadap Output Sektor Produksi dan Tingkat Pendapatan Rumah Tangga

di Jawa Tengah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2010, 28-45

Kompas, Boros Urea Bersubsidi 1 Juta Ton per Tahun. Senin, 15 Oktober 2012. hlm. 18.

Kotler, P dan G. Amstrong. 2001. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Cet ke-8. Erlangga. Jakarta.

Monke, E.A. and S.R. Pearson. 1995. *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. Ithaca and London : Cornell University Press.

Osorio, C.G., Abriningrum, D.E., Armas, E. B and Firdaus, M. (2011). *Who is Benefiting From Fertilizer Subsidies in Indonesia?* Policy Research Working Paper. The World Bank, East Asia and Pacific Region, Poverty Reduction and Economic Management Unit.

Pearson, S., C. Gotsch, dan S. Bahri. 2005. Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian di Indonesia. Terjemahan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

PSE, 1997. Analisis Kemampuan Petani Membeli Pupuk (Laporan Penelitian Kerjasama PT Petrokimia Gresik dan PSE). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Syafei, R. 2000. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia. Bandung

Soekartawi, A. Soeharjo, Jhon, L. Dillon dan J. Brian Hardaker. 1986. *Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil*. UI Press. Jakarta.

Suryana, A. S. Mardianto dan M Ikhsan. 2001. *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.

Syafa'at, N., Purwotoo, Maulana, A dan Chaerul, M. M. 2006. *Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Distribusinya*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Stanton, W. J. 1984. *Prinsip Pemasaran*. Jilid 1, Cet Ke-7. Erlangga. Jakarta
Tjiptono, G. Chandra dan Dadi A. 2008. *Pemasaran Strategik*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

